



Buletin Parlementaria

Nomor 1154/II/VI/2021 • Juni 2021

Pemulihan Ekosistem Mangrove Untuk Jaga Habibat Hewan



KEJUA DPR-RI



3 Jemaah Haji Batal Berangkat, Puan Berharap Kuota Indonesia Ditambah



9 Komisi III Soroti Persoalan Pertambangan di Maluku Utara



9 772614 339005



BULETIN

Pemulihan Ekosistem Mangrove Untuk Jaga Habitat Hewan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini (baju kuning) memimpin Tim Kunspek meninjau pengelolaan ekosistem Mangrove di Cagar Alam Pulau Dua. Foto: Eko/nvl

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Cagar Alam Pulau Dua di Kabupaten Serang serta Program Rehabilitasi Mangrove di Kota Serang. Tak hanya meninjau dan melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan setempat, Anggota Komisi IV DPR RI yang terlibat dalam kunjungan ini juga melakukan penanaman bibit pohon bakau.

Menurut Anggia, kegiatan pemulihan ekosistem dilakukan demi menjaga habitat berbagai jenis hewan, termasuk burung migran dan burung lokal yang dikategorikan sebagai ekosistem bernilai penting karena dilindungi oleh undang-undang. Hal ini berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menjadi

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. “Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem mangrove yang menjadi habitat berbagai jenis burung migran dan jenis lokal yang dikategorikan sebagai ekosistem bernilai penting karena dilindungi oleh undang-undang,” papar Anggia di Cagar Alam Pulau Dua, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Jumat (4/6).

Saat berdialog dengan pemangku kepentingan setempat, Anggota Komisi IV DPR RI menyerap informasi mengenai gambaran pelaksanaan Program Rehabilitasi Mangrove di Kota Serang oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum-Ciliwung.

Anggia juga mengungkapkan, pelaksanaan Program Rehabilitasi Mangrove oleh BPDAS selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) dalam kaitannya dengan rencana realokasi Anggaran

Belanja Tambahan (ABT) BRGM untuk kegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar 9 Provinsi yang menjadi wilayah pengelolaan BRGM.

Hal di atas sejalan dengan salah satu butir kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kepala BRGM pada hari Kamis, 27 Mei 2021. Dalam kegiatan kunjungan ini, Komisi IV DPR RI juga menyerap aspirasi kelompok masyarakat di Kabupaten Serang dan Kota Serang Provinsi Banten selaku pelaksana kegiatan penanaman dalam Program Rehabilitasi Mangrove di Kota Serang, Provinsi Banten.

“Dengan informasi dari semua pemangku kepentingan, diharapkan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ini dapat memberikan hasil berupa rekomendasi terbaik untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang terkait,” ungkap Anggia. ■ eko/es

Jemaah Haji Batal Berangkat, Puan Berharap Kuota Indonesia Ditambah

Ketua DPR RI Dr. (H. C) Puan Maharani menyatakan parlemen memahami keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan calon jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji 1442 H/2021 Masehi. Meski demikian, Puan meminta pemerintah tetap melayani calon jemaah yang batal berangkat tahun ini.

“Pemerintah harus tetap melayani para calon jemaah haji yang batal berangkat, pastikan pelayanannya baik, mekanismenya jelas, jika calon jemaah meminta dananya dikembalikan,” kata Puan dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Kamis (3/6).

Politisi PDI-

Perjuangan itu menuturkan, sangat memahami alasan pemerintah membatalkan keberangkatan calon jemaah Indonesia untuk beribadah haji tahun ini. Pasalnya, hal utama yang harus dipastikan adalah keselamatan dan kenyamanan para jemaah Indonesia saat beribadah haji di Tanah Suci pada masa pandemi Covid-19.

Ia menyebutkan, pemerintah dan DPR RI sudah meminta pemerintah Arab Saudi memberi kelonggaran pada jemaah Indonesia untuk dapat beribadah haji tahun ini. “Tapi demi keamanan dan keselamatan semua, kita masih harus bersabar. Apalagi

muncul varian baru virus corona, dan orang yang sudah divaksin tidak dijamin tidak tertular,” ungkap Puan.

Sampai saat ini, pemerintah Arab Saudi belum memberikan keputusan terkait kuota untuk jemaah haji Indonesia.

Legislator dapil Jawa Tengah V itu turut menekankan pemerintah Indonesia juga harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pada calon jemaah haji untuk menyambut musim haji selanjutnya, atau pelaksanaan ibadah haji pada saat suasana sudah kembali normal.

■ sf



Ketua DPR RI Dr. (H. C) Puan Maharani. Foto: Kresno/nvl



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Naaval, Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ertangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saurn, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Inandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Annanda Prialandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Distribusi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Frederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Pemerintah Batalan Pelaksanaan Haji, DPR: Keselamatan Harus Jadi Prioritas

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa keputusan untuk tidak memberangkatkan haji sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah. Salah satu pertimbangan utamanya adalah bahwa saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi sehingga pertimbangan keselamatan jiwa menjadi prioritas.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi meniadakan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M. Keputusan itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaquut Cholil Qoumas dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (3/6).

"Dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima maqashid syariah, selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat," kata Gus AML, sapaan akrabnya, dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Kamis (3/6).

Diketahui, saat ini berdasarkan data dari Worldometers per Kamis

(3/6) pagi pukul 06.00 WIB, Covid-19 telah menginfeksi 172.382.953 orang di seluruh dunia. Dari jumlah itu, sebanyak 3.700.884 meninggal dunia. Di Indonesia, data per Rabu (2/6), total kasus sebanyak 1.831.773 dengan kasus baru sebanyak 5.246.

Karena itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut meminta masyarakat untuk bisa memahami bahwa keputusan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan terbaik untuk kemaslahatan umat.

Sebelumnya, Menag Yaquut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah menetapkan pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M bagi WNI yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. "Kami pemerintah melalui Kemenag menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Pemberangkatan Ibadah Haji 1442 H/2021 M," ujar Yaquut.

■ sf



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Andri/mvi

Komisi I Apresiasi Mekanisme Pendidikan Sesko TNI

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi mekanisme pendidikan yang dijalankan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI saat pandemi Covid-19 menyerang. Kesiapan terus dilakukan agar proses pembelajaran tetap berlangsung kepada Perwira Siswa (Pasis), sebagai bentuk pertahanan negara. Meutya ingin ke depannya fasilitas dan kurikulum selalu sigap dalam mengikuti kebutuhan dan permintaan era digital.

Meutya mengungkapkan hal tersebut saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Pgs. Komandan Sesko TNI beserta jajarannya, di Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/6). Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, kunjungan ke Sesko TNI ini bertujuan meninjau langsung kesiapan dan strategi yang sudah diterapkan Sesko TNI dalam mendidik Pasis.

“Kami melihat mekanisme pendidikan yang dijalankan oleh Sesko sudah cukup ideal, yakni berbasis pada *Adult Learning System*. Kondisi sedang pandemi, Sesko sudah siap melakukan proses belajar secara virtual”. Kami mengapresiasi hal ini sebagai bentuk kesiapan Sesko TNI dalam mengikuti perkembangan digital, yang mana proses pembelajaran tetap dilaksanakan dengan prioritas *safety, comfort, efektif, dan efisien*. Hal ini guna menciptakan beban belajar Pasis yang dirancang proporsional, sebagai bentuk menuju *Smart Campus*,” tutur Meutya.

Meutya dapat memahami harapan akan kebutuhan Sesko TNI Bandung itu sendiri. Ia bersama Anggota Komisi



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid. Foto: Dipa/nvl



ANGGARAN INI KEMUDIAN DIPERUNTUKKAN UNTUK PENINGKATAN FASILITAS PENDIDIKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KHUSUSNYA DI ERA DIGITAL

I DPR RI yang hadir, mengupayakan alokasi kebutuhan anggaran yang diajukan pada RKA Tahun Anggaran 2022.

“Kami melihat kebutuhan dari SDM di sini sudah cukup baik, namun sarana fasilitas serta kurikulum yang perlu ditingkatkan lagi. Dalam hal ini, kami segera tingkatkan alokasi yang nantinya akan diajukan ke RKA 2022, sebesar Rp256.702.742.305,.

Anggaran ini kemudian diperuntukkan untuk peningkatan fasilitas pendidikan pengembangan kurikulum khususnya di era digital,” pungkas Meutya.

Meutya menjelaskan, penambahan anggaran ini merupakan harapan sekaligus dukungan penuh Komisi I DPR RI terhadap mitranya. Hal ini dilakukan untuk mendorong Sesko TNI untuk melahirkan kader pimpinan TNI yang berkarakter kuat, berintegritas, memiliki visi yang maju, adaptif serta inovatif.

“Kami mengapresiasi kepada Sesko TNI Bandung, yang sudah bekerja optimal dalam membentuk Perwira TNI yang handal, profesional, serta proporsional. Kami berharap dengan manajemen kepemimpinan yang sudah dilatih penuh ini, dapat menjadikan bekal, sekaligus tuntutan yang kuat dalam hal menjaga pertahanan bangsa dan negara,” tutup legislator dari Sumatera Utara I itu. ■ dip/sf

Komisi I Dorong Peningkatan Kemampuan SatBravo 90 Paskhas TNI AU

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono berharap Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU dapat meningkatkan kemampuan sebagai satuan khusus elit TNI AU dengan ketersediaan, kecukupan, kemampuan, dan kesiapan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk menunaikan tugas dan fungsi khusus.

“Saya kira tidak ada alternatif lain kalau mau pertahanan kuat, kalau mau pertahanan bisa diandalkan, TNI bisa mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka harus didukung dengan peralatan yang memadai dan mumpuni,” kata Bambang usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi I DPR RI dengan Komandan Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU beserta jajaran di Bogor, Jumat (4/6).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan, pelatihan dan pendidikan

keterampilan di TNI sudah dilakukan secara berkala, dan di-*update* sesuai dengan kebutuhan yang ada. “Saya kira ada *learning cube* yang memang dibutuhkan. Tapi kan waktunya cukup, karena pelatihan pendidikan itu selalu dilakukan oleh seluruh TNI, *update* sekarang selalu dilakukan jadi *nggak* usah khawatir, anak-anak kita pintar-pintar *kok*,” terangnya.

Senada dengan Bambang, Anggota Komisi I DPR RI Sukanta juga menilai kemampuan yang dimiliki oleh Pasukan Khusus Elit TNI AU sudah sangat bagus. Akan tetapi fasilitas dan kesejahteraan prajuritnya harus lebih ditingkatkan, dan Komisi I DPR RI akan memperjuangkan untuk mewujudkan hal tersebut.

“Secara umum kemampuan pasukannya sangat bagus, tetapi fasilitasnya terbatas sekali dan kesejahteraan prajuritnya itu juga

”

SAYA KIRA TIDAK ADA ALTERNATIF LAIN KALAU MAU PERTAHANAN KUAT, KALAU MAU PERTAHANAN BISA DIANDALKAN, TNI KITA BISA MAMPU MELAKSANAKAN TUGASNYA DENGAN BAIK, MAKA HARUS DIDUKUNG DENGAN PERALATAN YANG MEMADAI DAN MUMPUNI

masih kurang. Saya kira ini perlu diperjuangkan untuk kesejahteraan prajurit ke depan. Juga peralatan cukup banyak, akan tetapi personilnya juga masih kurang. Peralatannya yang minimalis mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, kesejahteraan prajuritnya itu yang perlu didorong terus,” harapnya.

Perlu diketahui, bahwa Satuan Bravo 90 Pasukan Khas merupakan satuan pelaksana operasi khusus Korpaskhas yang berkedudukan langsung di bawah Dankorpaskhas. Dan Satuan Bravo 90 Paskhas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista/ instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. ■ ndy/es



Tim Kunspek Komisi I DPR RI meninjau fasilitas Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU. Foto: Nadia/nvl

Pembangunan Jaringan Internet dan Telekomunikasi Jangan Hanya Fokus Daerah 3T



Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah saat pertemuan Tim Kunspek Komisi I DPR RI dengan Bupati Pandeglang. Foto: Azka/nvl

Pembangunan jaringan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), tetapi pada faktanya masih banyak daerah di pulau Jawa yang mengalami kesenjangan sinyal. Pemerintah harus turut hadir di setiap wilayah Indonesia, dan jangan hanya fokus kepada daerah 3T.

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengungkapkan hal tersebut usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita beserta jajaran, Direksi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo), dan perwakilan Kodim dan Koramil Pandeglang di Kantor Bupati Pandeglang, Banten, Jumat (4/6).

“Pemerintah harus hadir dengan segala upaya yang dimiliki terkait pembangunan sinyal atau

telekomunikasi di daerah-daerah Pulau Jawa yang mengalami kesenjangan sinyal. Program merdeka sinyal harus terealisasi di daerah 3T maupun di Pulau Jawa sendiri,” kata Rizki.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, Pandeglang yang terdiri dari 35 Kecamatan dan hampir 400 desa, memiliki kontur pegunungan dan pesisir, ini merupakan kendala yang membuat kesenjangan akses internet masih terasa di daerah tersebut.

“Masih banyak masyarakatnya yang hidup di desa, di dalam desa lagi. Jadi akses menuju pusat, akses kepada jaringan telekomunikasi sangat sulit sekali didapatkan. Apalagi sekarang ini banyak anak-anak sekolah yang menerima pembelajaran dari sekolahnya lewat internet. Jaringan internet dan telekomunikasi harus segera terealisasi di (seluruh) Provinsi Banten,” katanya

Rizki mengapresiasi semangat BAKTI Kominfo yang akan segera

mendata ulang daerah–daerah yang belum menerima jaringan internet. BAKTI sendiri merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kominfo, dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal penyediaan infrastruktur, dan layanan telekomunikasi dan informatika di seluruh wilayah Indonesia.

“BAKTI harus segera mendata ulang daerah-daerah *blankspot* di wilayah 3T maupun tidak. Salah satu kesimpulan pertemuan hari ini ialah BAKTI harus bisa mendata ulang. Jangan nanti menyalahkan pemerintah daerah yang tidak mengusulkan daerah tersebut tetapi ternyata sudah mengusulkan. Ke depan saya berharap data-data ini harus terpadu dan bisa sinkron untuk membantu pemda membangun sinyal (internet) untuk masyarakatnya,” tutup politisi Dapil Banten I tersebut. ■ azk/sf



Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut beserta jajaran. Foto: Kiki/mvl

Komisi III Apresiasi Polda Sumut Ungkap Kasus Daur Ulang Alat Swab Tes Antigen

Komisi III DPR RI mengapresiasi jajaran Polda Sumatera Utara yang telah mengungkap kasus daur ulang alat swab tes antigen di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkapkan, permasalahan daur ulang alat swab tes antigen ini merupakan hal baru yang terungkap pada masa pandemi Covid-19. Hal ini menyadarkan, bahwa masih ada sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk kepentingannya sendiri.

“Tentang (alat tes) antigen ini hal baru yang bisa dibilang dalam masa pandemi ini kita harus memberikan satu

pengecahan yang sangat besar,” kata Sahroni saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut Irjen Pol. Panca Putra Simanjuntak dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut IBN Wiswantanu beserta jajarannya, di Medan, Sumut, Jumat (4/6).

Oleh sebab itu, Sahroni mendorong aparat keamanan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasannya guna menyikapi kejahatan kemanusiaan tersebut. Diharapkan kejadian tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari.

“Polda Sumut melakukan sesuatu yang di luar pemikiran orang-orang bahwa antigen ini dapat dipalsukan dan ini membuat kita semua terkejut.

Ini menjadi motor untuk semua bandara dan Polda terkait untuk menyikapi hal yang sama, jangan ada sampai berulang kejadian tersebut di kemudian hari,” tutup politisi Partai NasDem itu.

Sebelumnya Kapolda Sumut Irjen Pol. Panca Putra Simanjuntak menyatakan, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) yang berhasil mengungkap penggunaan atau daur ulang alat swab tes antigen di Bandara Kualanamu yang dilakukan suatu badan usaha. Dari hasil penyelidikan, Polda Sumut telah menetapkan 5 orang tersangka, dimana satu tersangka adalah direktur badan usaha tersebut. ■ qq/sf

Komisi III Soroti Persoalan Pertambangan di Maluku Utara

Persoalan pertambangan di Provinsi Maluku Utara menimbulkan persoalan hukum yang mengakibatkan dampak buruk terhadap iklim perekonomian dan investasi. Permasalahan pertambangan meliputi kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, penyerobotan lahan, tambang ilegal, perizinan yang tidak sesuai peruntukan, hingga persoalan pembukaan lahan dengan pihak penambang, kemudian menimbulkan konflik kepentingan dengan negara maupun masyarakat setempat.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Malut beserta jajaran dalam rangka pengawasan penegakan hukum terkait sumber daya alam dan permasalahan yang berkembang di masyarakat Ternate, Malut, Jumat (4/6).

“Hari ini Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke Provinsi Malut. Ini merupakan tugas komisi dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Dalam rencana strategis Komisi III DPR pada Periode 2019-2024 ini, salah satu hal yang disoroti adalah fungsi dari penegakan hukum dan pengamanan terhadap sektor penerimaan negara di bidang sumber daya alam,” jelas Pangeran.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini juga menuturkan, Komisi

III DPR memandang perlu untuk melaksanakan kunspek ke Malut dengan maksud untuk memastikan bahwa penegakan hukum di sektor sumber daya alam berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dan juga dilaksanakan secara serius dan sungguh- sungguh serta mendorong pihak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk bersama- sama tanpa adanya ego sektoral dalam melakukan penegakan hukum terhadap sektor pertambangan yang illegal untuk memaksimalkan penerimaan negara” imbuh Pangeran

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Maluku Utara Risyapudin Nursin menjelaskan, penegakan hukum kasus sumber daya alam yang ditangani

oleh Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Malut dalam waktu 2016 sampai 2021 telah menangani sebanyak 94 kasus. Kemudian kasus yang ditangani oleh Dit Reskrimsus dalam kurun waktu 2019-2021 sebanyak 13 kasus. Dan kasus yang ditangani oleh Dit Reskrimum Polda Malut sebanyak 5 kasus.

“Polda Malut juga telah melakukan pola koordinasi dan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penegakkan hukum dalam mencegah kebocoran di sektor penerimaan negara dan penyelamatan keuangan negara dalam sektor pertambangan. Di antaranya membuat Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan Kementerian ESDM tentang penegakan hukum di bidang ESDM. Dan membentuk tim kerja dengan Dinas ESDM provinsi baik dalam hal pencegahan maupun dalam penegakkan hukum,” ungkapnya. ■ tra/es



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh. Foto: Tiara/nvl

Komisi IV Kritisi Sarpras BIB Lembang

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengaku kagum dengan pengembangan dan produksi semen berbagai jenis sapi di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Jawa Barat, seperti *belgian blue* murni, *belgian blue cross angus* hingga jenis *angus*. Namun ia menilai masih perlu adanya dukungan terhadap sarana dan prasarana BIB Lembang. Apalagi diketahui, lahan BIB saat ini hanya 244.664 meter persegi. BIB meminta tempat yang lebih luas lagi dan penguatan infrastruktur karena itu semua berjalan lurus guna menunjang kapasitas produksi.

“BIB Lembang ini memiliki tempat yang sangat bagus sekali. Butuh fasilitas

untuk pengembangan ya silakan saja. Di benak saya masih terpikir seperti ini, pikirkan dulu kaki duanya setelah itu kaki empatnya, maksudnya Sumber Daya Manusianya dulu baru bantuan sapinya, jika diberikan sapinya dulu, ujung-ujungnya sapinya mati,” jelas Sudin usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau peternakan BIB, di Lembang, Jawa Barat, Sabtu (5/6).

Politisi PDI-Perjuangan tersebut meminta kepada Direktorat Jenderal Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kinerjanya. Jika tidak bisa mengubah dan tidak bisa mengambil terobosan, maka Indonesia akan tetap impor

daging dari India. “Itu bukan solusi, tetapi polusi. Solusi lain ya itu, peningkatan SDM. Ini yang nomor satu, kalau SDM-nya tangguh dan bagus, Insya Allah akan datang (Ditjen) PKH yang jauh lebih bagus dan baik dari pada saat ini,” harapnya.

Kepala BIB Tri Harsi mengatakan bahwa BIB Lembang masih memerlukan dukungan anggaran untuk penambahan lahan, pengembangan layanan dan instalasi pemeliharaan ternak, kemudian peningkatan penambahan alokasi anggaran Ditjen PKH untuk meng-cover kebutuhan nasional, dan penguatan anggaran untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis (UPT) penghasil bibit unggul. ■ cas/sf



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin (kanan) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau peternakan BIB, di Lembang, Jawa Barat. Foto: Chasbi/nvl

Politeknik KP Karawang Harus Miliki Dasar Teknologi yang Kuat



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau produk dan inovasi Politeknik KP Karawang. Foto: Jaka/nvl

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Karawang harus memiliki dasar teknologi yang kuat. Selama ini teknologi masih menjadi masalah bersama, baik itu di bidang perikanan, kelautan, dan pertanian yang menyebabkan berbagai sektor tersebut belum berkembang. Ia berharap minimal ada satu perwakilan dari tiap daerah yang kuliah di Politeknik untuk meng-cover teknologi, dimana mereka menjadi pelopor perubahan berbudidaya.

“Mari sama-sama kita jujur, teknologi memang masih menjadi *problem* kita.

Saya juga harap ke depan di politeknik ini juga ada jurusan perkapalan yang membuat kapal untuk nelayan, dari mulai harga terendah sampai harga tertinggi,” kata Dedi saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR mengunjungi Politeknik KP Karawang di Jawa Barat, Jumat (4/6).

Legislator dapil Jawa Barat VII ini menuturkan, selain harus produktif Politeknik KP juga harus memperhatikan teknologi yang memang dibutuhkan *market*. Ini juga yang terkadang masih menjadi kelemahan dalam sistem pengelolaan pendidikan. Misalnya saja di bidang perikanan, menurutnya masalah yang selama ini menjadi kendala adalah teknologi bagaimana membuat pakan sendiri.

“Seandainya saja, kita bisa punya kemandirian membuat pakan, masalah yang selama ini ada di perikanan itu selesai. Sama kaya petani *problemnya* dipupuk, kalau petani sudah bisa menyelesaikan masalah pupuk, selesai sudah masalahnya,” terang Dedi.

Menurutnya, sebenarnya perikanan dan pertanian bisa disatukan seperti teknologi Minapadi, di mana sistem ini mengadopsi dua nilai. Pertama nilai perikanan yang melahirkan sumber daya pupuk dan kedua nilai pertanian yang menghasilkan sumber daya pangan. Jadi, ikan itu mengambil pangan dari pertanian, pertanian disubsidi pupuk dari perikanan.

Politisi Fraksi Golkar ini menilai, produk pertanian dan perikanan saat ini sudah mulai terancam di pasaran. Dikarenakan produknya banyak mengandung unsur-unsur kimiawi terlalu tinggi dan tidak ramah lingkungan serta kesehatan, sehingga dianggap tidak kompetitif dari segi kualitas.

“Paradigma seperti ini harus segera dijawab oleh kita, mengembalikan peternakan memiliki dasar pertanian, pertanian memiliki dasar peternakan, kelautan dan kehutanan juga sama. Sehingga menjadi suatu siklus pertanian, peternakan, dan kelautan yang ramah terhadap lingkungan dan kesehatan,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

Dedi menyarankan, Kementerian KP juga perlu membuat peta seluruh Indonesia baik itu untuk pendirian Politeknik KP maupun mahasiswanya. Untuk Politeknik sendiri, harus dibuat yang langsung akses ke pantai atau di daerah penghasil perikanan air tawar.

“Kemudian untuk mahasiswanya juga harus dipetakan, dari mana saja. Misalnya, untuk Politeknik Karawang yang juga berlokasi di Provinsi Jawa Barat, perlu menjangkau seperti daerah Indramayu, Cirebon, Sukabumi dan lainnya. Harus ada mahasiswa yang mewakili minimal tiap daerah satu. Dengan begitu, teman-teman di DPR yang mewakili dapilnya masing-masing juga bisa membawa anak didiknya untuk kuliah di sini,” tutupnya. ■jk/es

Komisi X Keluhkan Akses Menuju Destinasi Wisata Dieng



Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau produk hasil masyarakat Kawasan Wisata Dieng. Foto: Mentari/nvl

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengeluhkan akses jalan menuju destinasi wisata Dieng yang hingga saat ini belum dilakukan pelebaran. Ia mengungkapkan, jalan tersebut terdaftar sebagai milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak dapat merevitalisasi infrastruktur tersebut.

Hal ini disampaikan Agustina usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemda Wonosobo di Dieng, Jawa Tengah, Jumat (4/6). Komisi X berharap, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menggaungkan kembali Dieng menjadi salah satu destinasi wisata internasional yang wajib dikunjungi.

”

DIENG SAAT INI SUDAH SEMAKIN BAIK DARI SEGI PENAMPILAN, PELAYANAN, KEBERSIHAN, DAN KERAPIHAN. HANYA SAJA AKSES JALANNYA MASIH BELUM MEMADAI UNTUK MENUJU KAWASAN WISATA, KARENA MASIH TERLALU SEMPIT DILALUI DUA MOBIL.

“Orang kalau mau datang ke sini pertanyaannya pertama, jalannya sudah lebar belum? Usut punya

usut, ini jalan punya provinsi jadi kabupaten maupun pemerintah pusat tidak bisa bangun. Mudah-mudahan teman-teman Pemprov yang tadi kita undang dapat menyampaikan agar segera dimulai sedikit demi sedikit, setahun demi tahun dilebarkan aksesnya. Jadi wisatawanannya akan lebih banyak yang datang,” terang Agustina.

Agustina juga menilai, Dieng saat ini sudah semakin baik dari segi penampilan, pelayanan, kebersihan, dan kerapihan. Hanya saja akses jalannya masih belum memadai untuk menuju kawasan wisata, karena masih terlalu sempit dilalui dua mobil. “Kemudian fasilitas umum sangat memadai, cuma akses jalannya masih terlalu sempit apalagi kalau untuk dua mobil itu udah langsung ribet banget,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Agustina mengungkapkan jenis wisata di Dieng saat ini sudah banyak berkembang. Para wisatawan dapat menikmati wisata paralayang, pendakian gunung, serta terdapat *homestay* yang menjadi penunjang ekonomi warga sekitar Dieng. “Nah padahal sudah bagus dan indah sekali. Saya yakin orang yang datang ke Dieng pasti tidak hanya sehari dua hari,” terangnya.

Ia meminta keberpihakan pemprov dalam menunjang objek wisata prioritas internasional ini agar berkembang lebih baik. “Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harusnya ulurkan tangan. Pemerintah kabupaten sudah maksimal. Kalau tidak ada sentuhan dari provinsi dan pemerintah pusat, Dieng tidak akan berkembang seperti yang diharapkan menjadi menyangga destinasi superprioritas,” tutupnya. ■ **mri/es**

Komisi X Dukung KEK Tanjung Lesung Dapatkan Perhatian Khusus

Komisi X DPR RI mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pasalnya, sebagaimana disampaikan pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu, obyek wisata Tanjung Lesung tidak lagi menjadi sepuluh destinasi prioritas atau kerap disebut 'Bali Baru'.

"Kita juga melihat (Tanjung Lesung) ini ada potensi ya, karena mungkin relatif dekat dengan ibu kota. Terlebih ada pembangunan infrastruktur ke depannya, potensi alamnya, budayanya,

bahkan potensi menjadi *geopark*," jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke destinasi wisata Tanjung Lesung, di Pandeglang, Banten, Jumat (5/6).

Hetifah berharap pendekatan prioritas strategi pembangunan wisata tidak dalam jumlah yang terbatas. Melainkan, beri perhatian kepada semua destinasi prioritas per wilayah. "Berikan kesempatan kepada daerah untuk mempersiapkan destinasi unggulannya. Sehingga, bisa jadi ada 100 destinasi yang baru dan mendapat perhatian, sampai ke level desa wisata. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan strategi, termasuk untuk Tanjung Lesung, untuk

Provinsi Banten ini jelas prioritas," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Diketahui, destinasi wisata Tanjung Lesung memiliki luas area 1.500 Ha dengan beragam potensi, di antaranya adalah keindahan alam pantai, keragaman flora-fauna, serta kekayaan budaya yang eksotis. Destinasi ini dekat dengan atraksi wisata Banten lainnya, seperti Kawasan Tua Banten, Budaya Badui, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Meskipun demikian, destinasi ini pernah mendapat musibah berupa tsunami pada tahun 2019.

"Jadi, catatan dalam kunjungan ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu berkolaborasi lebih sinergis. Tidak hanya oleh Kemenparekraf saja, tapi juga Kementerian PUPR, Kemenhub, bahkan juga BNPB. Karena di sini salah satu daerah yang potensi tsunami, maka harus ada satu sentuhan rasa aman bagi pengunjung,

”

PENDEKATAN PRIORITAS STRATEGI PEMBANGUNAN WISATA TIDAK DALAM JUMLAH YANG TERBATAS. MELAINKAN, BERI PERHATIAN KEPADA SEMUA DESTINASI PRIORITAS PER WILAYAH

salah satunya ada tempat dan jalur evakuasi," tambah Hetifah.

Kunjungan ini turut diikuti sejumlah Anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Ledia Hanifa Amaliah, Bramantyo Suwondo, Desi Ratnasari, Andreas Hugo Pareira, Nuroji, Andi Muawiyah Ramly, Illiza Sa'aduddin, Ratih Megasari, Mustafa Kamal, Rian Firmansyah, dan Djohar Arifin Husin.

■ rdn/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian foto bersama usai memimpin Kunspek Komisi X DPR RI ke destinasi wisata Tanjung Lesung, di Pandeglang, Banten. Foto: Ridwan/nvl

Komisi X Dorong Pengembangan SDM Desa Wisata di Banyuwangi

Anggota Komisi X DPR RI Nur Purnamasidi mendorong pengembangan desa wisata di Banyuwangi, Jawa Timur antara lain meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku wisata dan warga desa. Tak hanya itu, diperlukan juga pembangunan sistem digital terkait dengan UMKM yang ada di desa tersebut.

“Kami melakukan pendampingan desa wisata yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya. Hingga nanti harapannya dari desa tertinggal menjadi desa maju lalu desa wisata mandiri,” ujar Nur Purnamasidi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (4/6).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, Desa Kemiren di Banyuwangi merupakan desa wisata yang dihuni oleh mayoritas Suku Osing, yang merupakan suku asli Banyuwangi. Desa Kamiren masih menjaga otentikasi lokalnya, mulai dari bangunan rumah tradisional hingga tradisi budaya yang tetap terjaga.

“Menurut kami, masyarakat Desa Kemiren memiliki kesadaran untuk mengembangkan desanya menjadi destinasi wisata dengan menyuguhkan lokalitasnya yang dikemas secara menarik sehingga mampu mengundang kunjungan wisatawan. Tak hanya itu, keramahan warganya dalam menyambut wisatawan juga bagus,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kehadiran Komisi X DPR RI ke Banyuwangi untuk menggali pengembangan desa wisata di Indonesia. Selama di Banyuwangi,

mereka mengunjungi Desa Kemiren di Kecamatan Glagah Banyuwangi sekaligus menggelar dialog dengan para pelaku wisata.

“Masukan-masukan dari pelaku wisata ini nantinya akan menjadi bekal kami saat rapat kerja dengan Kemenparekraf. Program apa yang efektif dan terukur untuk pengembangan desa wisata nantinya. Masukan ini nantinya bisa menjadi *benchmark* bagi pengembangan desa wisata di tingkat nasional,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas

kunjungan Komisi X DPR RI. “Ini sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kami, karena secara turut dilibatkan dalam pengembangan desa wisata nasional,” ujar Ipuk kepada Komisi X DPR RI.

Ipuk berharap para wakil rakyat ini bisa mendukung ekowisata yang selama ini menjadi dasar pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Baginya, desa wisata adalah relasi dari ekowisata. “Pandemi ini secara tidak langsung membuat kita semua beralih pada wisata alam. Banyuwangi sendiri terus berbenah dan menyiapkan diri untuk menerima wisatawan namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” pungkasnya. ■ eno/es



Foto bersama Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan Bupati Banyuwangi. Foto: Eno/nvl

Komisi XI Apresiasi PSBI untuk UMKM di Banten



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari. Foto: Andri/nvl

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari, mengapresiasi program yang dilakukan Bank Indonesia (BI) Banten dalam memberikan bantuan permodalan dan pembinaan kepada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) se-Banten melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

“Bantuan dan pembinaan kepada UMKM itu diharapkan dapat mendorong peningkatan skala usaha, akses pasar, dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Hatari usai melakukan pertemuan dengan BI Perwakilan Banten yang juga dihadiri oleh Wali Kota Serang Syafrudin Syafe’i di Kantor Wilayah Bank Indonesia Serang, Banten, Jumat (4/6).

Sebagaimana diketahui, dampak

pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di semua sektor, salah satunya berdampak pada pelaku UMKM.

Sektor UMKM memiliki peran penting dalam pertahanan perekonomian Bangsa Indonesia.

Menurut data BPS tahun 2017, unit usaha UMKM menempati 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia dengan jumlah 62,9 juta unit usaha menurut Bank Indonesia. Tak hanya itu, UMKM menyerap 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja dan menyumbang sebesar 60,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Akibat dampak pandemi tersebut, maka pemerintah melakukan program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari total biaya yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020, sebesar Rp695,2 triliun, sejumlah Rp123,46 triliun dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM.

“Kita tadi mendengar pemaparan dari Pemerintah Kota Serang dari sisi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Kota Serang pada tahun 2020 mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 6,20 menjadi minus 1,29 persen di tahun 2020. Ini merupakan resultan dari sebagian besar sektor yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19,” urai Hatari.

“Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kota Serang mengalami penurunan

”

PEREKONOMIAN KOTA SERANG PADA TAHUN 2020 MENGALAMI KONTRAKSI DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA. DI MANA PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2019 SEBESAR 6,20 MENJADI MINUS 1,29 PERSEN DI TAHUN 2020.

dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Rp45,89 juta di tahun 2019 menjadi Rp45,17 juta di tahun 2020, atau mengalami kontraksi sebesar 1,57 persen dibandingkan tahun 2019. Ini mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian menjadi lesu, sehingga pendapatan masyarakat menurun,” sambung politisi Partai NasDem itu.

Sebagai Komisi yang menangani keuangan dan perbankan, lanjut Hatari, pihaknya ingin melihat laporan kinerja Pemkot Serang, dan BI Banten, mengenai perkembangan UMKM di Serang sehingga apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat ditindak lanjuti dalam Rapat Kerja di Komisi XI DPR RI.

Legislator dapil Maluku Utara ini berharap, bantuan PSBI dapat dimanfaatkan secara optimal dan juga berharap langkah sinergi antara BI dengan pelaku usaha serta pemerintah daerah maupun pihak lainnya dapat terus terjalin untuk memajukan UMKM di seluruh wilayah Banten. ■ man/es

Pemerintah harus Prioritaskan Pemulihan UMKM

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kota Bogor Andreas Eddy Susetyo menyampaikan, salah satu sektor yang terdampak secara signifikan oleh pandemi Covid-19 adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mayoritas bergerak pada skala kecil, dengan modal yang juga sangat minim.

Ia menambahkan, pembatasan aktivitas yang sempat dilakukan dan juga perlambatan ekonomi, berimbas pada ketahanan UMKM. Namun sektor UMKM inilah yang paling berperan menguatkan roda pertumbuhan ekonomi secara nasional, karena UMKM ada di seluruh Indonesia.

“Pemerintah harus memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional. UMKM berkontribusi 61,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97 persen dari total angkatan kerja atau 116,9 juta tenaga kerja,” ucap Andreas dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan Wali Kota Bogor dan Perwakilan Bank Indonesia Kota Bogor beserta jajarannya, di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/6).

Oleh karena itu, lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021 sebesar Rp699,43 triliun. Khusus untuk dukungan terhadap UMKM, telah dialokasikan anggaran PEN sebesar Rp184,83 triliun. “Dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi diberikan melalui enam stimulus, yaitu Subsidi Bunga UMKM, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Subsidi Imbal Jasa

Penjaminan (IJP), Penempatan Dana pada Bank Umum, Insentif Pajak, dan Restrukturisasi Kredit,” ungkap Andreas.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Komisi XI DPR ingin mendapatkan informasi terkait dengan dukungan Bank Indonesia kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor terhadap UMKM di Jawa Barat agar naik kelas dan menjadi juara di region.

Selain itu, masih kata Andreas, Komisi XI DPR RI juga ingin mengetahui langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia Kota Bogor untuk terus mencetak pelaku UMKM berkualitas melalui program

Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI), serta sektor-sektor yang mendominasi sektor UMKM di Bogor untuk mengetahui *growth* mayoritas UMKM pada setiap sektor dan sektor-sektor yang perlu dikembangkan ke depannya.

“Kami juga ingin mendapatkan informasi terkait dengan dukungan BI terhadap UMKM yang belum melekat teknologi tetapi memiliki daya saing produk yang bagus dan dukungan kepada pelaku UMKM yang berada di lokasi daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta akses internet,” pungkas Andreas. ■ [dep/es](#)

Anggota Komisi XI DPR RI
Andreas Eddy Susetyo.
Foto: Devi/nvl



Komisi XI Dorong Produk UMKM Orientasi Ekspor

Upaya Bank Indonesia (BI) untuk memajukan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program agar dapat berorientasi ekspor mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah. Meski penuh tantangan, menurutnya UMKM memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor.

“Kami apresiasi Bank Indonesia dalam menggandeng UMKM di tengah pandemi ini. Visi misi ke depan kita adalah ekspor, sehingga secara masif kami mendorong agar UMKM khususnya di Jawa Barat semaksimal mungkin untuk bisa mencapai pasar global,” ujarnya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan perwakilan BI, OJK, Himbara, dan UMKM binaan BI terkait stimulus UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (4/6).

UMKM merupakan penggerak ekonomi nasional, khususnya dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional. UMKM berkontribusi 61 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun sayangnya masih banyak UMKM yang memproduksi produknya hanya untuk konsumsi masyarakat di daerahnya saja. Walau begitu, ada juga UMKM yang sudah mendunia, namun menurutnya masih sangat sedikit jumlahnya.

“Karena itu, kami minta BI lebih pro aktif dalam mencari UMKM yang berpotensi menjadi ekspor. Karena kalau kita bina dengan maksimal baik berkaitan dengan SDM dan pemasarannya itu juga menjadi potensi UMKM go ekspor, kata politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.



Foto bersama Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan perwakilan BI, OJK, Himbara, dan UMKM binaan BI. Foto: Anne/nvl

Khusus di Jawa Barat yang merupakan satu lumbung UMKM, menurutnya, masih banyak potensi ekspor diantaranya produk fesyen, furnitur serta kerajinan. Untuk itu, lanjutnya, Komisi XI DPR RI akan terus memberikan dukungan dalam mempermudah permodalan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Himbara. Mengingat, berdasarkan temuannya di lapangan, masih banyak ditemukan kendala permodalan.

“Untuk permodalan UMKM paling tepat menggunakan KUR, hanya saya mengimbau pada Himbara agar lebih proaktif pada UMKM. Karena selama ini banyak informasi yang simpang siur dan menyebabkan UMKM enggan untuk mengakses KUR,” jelas legislator dapil Jabar XI itu lebih lanjut.

Diakuinya, tak sedikit pelaku usaha kecil menengah terkendala persyaratan untuk mengakses pembiayaan. Oleh

karena itu, pihaknya mendorong Himbara memberikan kemudahan bagi kredit perbankan UMKM. “Kita juga memberikan jaminan kepada KUR ini sehingga tidak alasan Himbara untuk mengkhawatirkan kepastian pembayaran ke depan ini,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi menyampaikan program BI dalam mendukung UMKM agar bertaraf internasional. Salah satunya BI meminta perbankan agar ikut dalam melakukan pemberdayaan UMKM baik aspek produksi, keuangan, SDM hingga digitalisasi.

Selain itu, BI juga sudah menurunkan suku bunga acuan sebesar 250 basis poin, dari 6 persen menjadi 3,5 persen. Turunnya suku bunga acuan diharapkan mampu mendorong penyaluran kredit perbankan sehingga membantu pemulihan ekonomi. ■ ann/sf

Baleg DPR RI Sosialisasi RUU Pembentukan PTA di Bali



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Gubernur Bali beserta jajaran. Foto: Ria/nvi

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengapresiasi sikap Gubernur Provinsi Bali yang menyambut baik rencana DPR RI yang akan membangun Pengadilan Tinggi Agama di Bali melalui RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang saat ini tengah dibahas.

Anggota Baleg DPR RI Sodik Mudjahid saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg dengan jajaran Pemerintah Provinsi di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (3/6) menyampaikan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama dilakukan karena adanya pemekaran beberapa provinsi. Daerah hukum suatu pengadilan tinggi yang tadinya dalam satu provinsi sudah terpecah menjadi dua provinsi, hal ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kurang optimal.

“Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan, pengawasan dan pelayanan peradilan serta dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 4 ayat (2) UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa daerah hukum pengadilan tinggi meliputi wilayah provinsi. Maka perlu dibentuk pengadilan tinggi di tiap provinsi yang belum memiliki, sehingga lebih dekat dengan lembaga pengadilan yang dibina dan diawasi. Salah satunya di Bali yang masih menyatu di Pengadilan Tinggi Agama Mataram,” kata Sodik.

Disampaikan politisi Partai Gerindra itu, peran serta lembaga peradilan dalam proses penegakan hukum tidak dipisahkan dari kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, mengingat pengadilan adalah suatu lembaga tempat memeriksa, mengadili dan memutuskan atau menyelesaikan sengketa hukum. Bahkan pengadilan dianggap sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan.

“Namun, agar masyarakat dan pemangku kepentingan mengetahui rencana penyusunan RUU ini, kita melakukan sosialisasi ke Bali sekaligus meminta masukan dari pemangku kepentingan serta masyarakat, sehingga dapat mencerminkan kebutuhan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pembinaan dan pengawasan lembaga peradilan di bawahnya,” jelas Sodik.

Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster menyambut baik atas penyusunan RUU 5 PTA di wilayah Indonesia, termasuk PTA Bali. “Karena sampai saat ini Provinsi Bali belum memiliki Pengadilan Tinggi Agama, untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Bali serta mewujudkan tata peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, sudah saatnya membentuk PTA Bali di wilayah Bali,” katanya, seraya berharap pembentukan PTA dapat membuat masyarakat Bali yang beragama Islam selalu menjadikan hukum sebagai panglima di Bali. ■ rmi/sf



Baleg Serap Aspirasi RUU Pembentukan PTA di Sorong

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dipimpin Anggota Baleg Sturman Panjaitan

melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pengadilan Agama se-Provinsi Papua Barat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Papua Barat.

“Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 bahwa pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang maka pembentukan pengadilan tinggi agama di beberapa provinsi yang belum memiliki pengadilan tinggi agama sebagaimana Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Utara diawali dengan membuat payung hukum undang-undang,” ungkap Sturman di Kota Sorong, Papua Barat, Senin (7/6).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, masyarakat Provinsi Papua Barat saat ini bila ingin memperoleh keadilan hukum pada peradilan banding harus lintas provinsi yaitu ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Hal ini tentu cukup menyulitkan bagi masyarakat, sementara di sisi lain juga menjadi masalah jarak rentang kendali pembinaan dan pengawasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.

“Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama ini untuk memenuhi kebutuhan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan untuk

masyarakat dalam pembentukan pengadilan tinggi agama nantinya.

“Dari hasil tinjauan lapangan Tim Kunker Baleg kondisi Pengadilan Agama Sorong saat ini masih belum layak dari sisi luas ruangan dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Ruang sidangnya terlalu sempit untuk ukuran masyarakat Papua yang memiliki budaya berkumpul bersama ketika ada kasus-kasus di pengadilan,” ungkap Sturman.



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat. Foto: Ojji/nvl

”

DARI HASIL TINJAUAN LAPANGAN TIM KUNKER BALEG KONDISI PENGADILAN AGAMA SORONG SAAT INI MASIH BELUM LAYAK DARI SISI LUAS RUANGAN DAN BERBAGAI FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA.

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan oleh peradilan tinggi kepada lembaga peradilan di bawahnya,” tandasnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan agar bagaimana wilayah Papua Barat yang luas ini, bisa mengakomodir adat komunal

la menyarankan agar dipikirkan dari sekarang proporsional luas ruangan PTA agar nantinya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat Papua Barat.

Di lain pihak, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, H. Agus Budiadji mengungkapkan harapannya agar pembentukan PTA Sorong bisa segera terealisasi karena menjadi salah satu kebutuhan riil di Papua Barat. Selama ini pihaknya kesulitan melakukan pembinaan dari Jayapura ke wilayah Papua Barat karena harus melalui jalur pesawat dengan biaya tinggi yang sulit terjangkau dengan anggaran pembinaan yang ada.

“Jika sudah dibentuk PTA Papua Barat kami akan sangat gembira karena akan memutus kesulitan pembinaan selama ini. Kita ke depan akan selalu berkoordinasi terkait pelimpahan wewenang dan perkara dalam masa transisi jika PTA Sorong terealisasi,” pungkas Agus. ■ oji/es

BKSAP: Pendidikan Jadi Pintu Masuk Kesetaraan Gender

Wakil Ketua Badan Kerja Sama (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyampaikan, masalah ketertinggalan wanita umumnya menjadi problem di negara-negara dunia ketiga, seperti di Afrika, kemudian di Asia khususnya Asia Tengah dan Asia Timur Tengah yang masih memiliki banyak persoalan

pengklasteran bahwa perempuan tidak perlu untuk ikut bersama laki-laki dalam hal kesetaraan.

“Banyak yang kita lakukan dewasa ini, khususnya wanita-wanita di parlemen itu mereka menyatukan pendapat bahwa tidak ada persoalan yang harus kita kotak-kotakan antara kesempatan laki-laki dan kesempatan perempuan untuk

mencapai tujuan kemajuan,” ungkap Hafisz usai mengikuti *Roundtable Discussion* dengan tema “Generating Commitments To Build Forward”, secara *hybrid* di Tangerang, Banten, Selasa (8/6).

“Maka dari itu saya sampaikan, sebetulnya yang kita permasalahan bukan 20 persen atau 30 persen atau 50 persen (keterlibatan perempuan di parlemen), kita ingin betul-betul orang yang terpilih itu yang mempunyai kemampuan, terserah perempuan atau laki-laki. Saya pikir yang penting aksesnya, ketika suatu lembaga politik memberikan akses yang cukup kepada wanita, maka dia akan siap untuk bertarung di situ,” ungkapnya.

Lebih lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai bahwa wanita mempunyai beberapa keterbatasan fisik, sehingga dalam segala hal akan sulit juga akan mengalahkan kaum adam yang fisiknya memang lebih kuat. Namun keduanya memiliki kesamaan dari sisi kemampuan berfikir ataupun sisi emosional.

“Maka dari itu, pendidikan lah pintu masuknya. Saya sampaikan bahwa dengan pendidikan kita bisa melihat bahwa kemampuan-kemampuan ini akan diuji di sana, apakah dia akan kompeten ketika mewakili rakyatnya untuk menjadi Anggota DPR, apakah dia kompeten, dia menjadi pimpinan-pimpinan di lembaga parlemen dunia. Jangan sampai salah arah bahwa seolah-olah emansipasi ini hanya memberikan kesempatan wanita sebesar-besarnya untuk menjadi karier politik, bukan begitu,” ujar Hafisz.

“Sebetulnya adalah akses pendidikan yang kita berikan kepada perempuan itu harus sama dengan laki laki, tidak boleh dibedakan, termasuk juga kesempatan mereka untuk menikmati posisi-posisi tertentu. Maka dari itu, dalam sisi apapun saya kira dominasi laki-laki itu dia akan lebih determinasi dalam sisi fisiknya, tetapi untuk yang lain-lain kami sepakat semua akses itu harus sama,” tandas legislator dapil Sumatera Selatan I itu menutup pernyataannya. ■ skr/sf

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Foto: Azka/nvl

HON. Mr. A. HAFISZ TOHIR

VICE CHAIRMAN OF THE COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION (BKSAP) DPR RI

Pansus DPR Serap Masukan RUU Landas Kontinen di Sulut

Wilayah perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau UNCLOS 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Berdasarkan UNCLOS 1982 tersebut Indonesia dapat menetapkan wilayah landas kontinen Indonesia. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia di laut, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati.

“Provinsi Sulawesi Utara itu berbatasan dengan negara lain, termasuk pulau-pulau terluar yg memang harus mendapatkan perlindungan secara hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 itu sudah tua dan kemudian ada UNCLOS 1982 perlu diperbaharui, dengan diperbaharuihnya perlu masukan-masukan (dari pemerintah daerah dan stakeholder),” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus Landas Kontinen DPR RI TB. Hasanuddin saat pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utara beserta jajaran di Manado, Sulut, Jumat (4/6).

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen ini merupakan inisiatif dari pemerintah, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hasanuddin memastikan, Tim Pansus DPR RI telah siap bekerja sama dengan pemerintah



Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus Landas Kontinen DPR RI TB. Hasanuddin. Foto: Aisyah/rwl

”

MUDAH MUDAHAN DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG INI KITA LEBIH DAPAT MANFAAT LEBIH BANYAK DAN KEAMANAN DI SEKITAR PERBATASAN LEBIH TERJAGA DENGAN ADANYA PENDEKATAN SEPerti INI

untuk menggolkan pembahasan RUU ini, namun dibutuhkan masukan serta data yang valid dan akurat dari daerah.

Sementara itu, Gubernur Sulut Oilly Dondokambey mengatakan, RUU

Landas Kontinen ini sangat penting bagi daerah yang dipimpinnya, karena letak geografis Sulut yang berada di bibir Pasifik. Menurutnya, hal ini sangat baik karena dapat mengetahui potensi-potensi yang akan menjadi manfaat bagi rakyat Sulut. “Mudah mudahan dengan adanya undang-undang ini kita lebih dapat manfaat lebih banyak dan keamanan di sekitar perbatasan lebih terjaga dengan adanya pendekatan seperti ini,” harap Oilly.

Pertemuan ini turut dihadiri Komandan Lantamal VIII TNI AL, Kepala Kantor Kamla Zona Matirim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, Akademisi Universitas Sam Ratulangi, Kepala Kantor PT. Pertamina (Persero) Sulut dan Kepala Divisi Regional PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Sulut. ■ ais/sf

BURT Rekomendasikan RS Surya Husada Bali Jadi *Provider* Jasindo

Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ke Bali Novita Wijayanti merekomendasikan Rumah Sakit Surya Husada Denpasar dan Nusa Dua di Bali menjadi salah satu RS *provider* PT Jasindo yang akan memberikan pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI dan keluarganya khususnya daerah pemilihan Bali ataupun yang sedang melakukan kunjungan ke Bali.

“Rumah Sakit Surya Husada di Denpasar termasuk rumah sakit yang besar, fasilitasnya baik, memiliki 128 kamar yang ada di Denpasar dan memiliki 80 sampai dengan 100 kamar di Nusa Dua, serta merupakan rumah sakit spesialisasi urologi,” papar Novita usai pertemuan Tim BURT DPR dengan jajaran Direksi RS Surya Husada di Denpasar, Bali, Jumat (4/6).

Setelah menjadi RS *provider* PT Jasindo, Novita mengharapkan RS Surya Husada dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh pejabat negara di Indonesia dan memiliki *database* yang akurat baik data Anggota DPR RI maupun seluruh pejabat negara yang ada di Indonesia dan keluarganya.

“Kami mengharapkan, Rumah Sakit Surya Husada akan melayani maksimal kepada para pemangku yang memang sedang akan membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi tadi ada komunikasi dimana kita menginginkan databasenya harus akurat baik di DPR maupun seluruh pejabat yang ada di Indonesia,” harap anggota dewan dapil Jawa Tengah VIII ini.

Dalam pertemuan yang dihadiri pula oleh Wakil Ketua BURT Evita Nursanty, serta Anggota BURT Ribka Tjiptaning, Paramita Widya Kusuma, dan Lasmi Indaryani tersebut, Novita meminta jajaran manajemen RS Surya Husada memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku terkait layanan kesehatan bagi seluruh pejabat negara termasuk isteri atau suami dan anak-anak.

Lebih lanjut politisi Gerindra ini menyampaikan, pelayanan RS Husada kepada masyarakat umum dilakukan secara maksimal. Selain menjadi salah satu rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 juga menjadi tempat vaksin lansia.

“Pihak Rumah Sakit Surya Husada tadi menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat secara umum juga sudah maksimal, dan juga menjadi salah satu rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 dan menjadi tempat program vaksin bagi lansia. Untuk penanganan Covid-19 tempatnya

berbeda, sehingga bisa menjadi tempat karantina yang baik. Sehingga kita dapat merekomendasikan menjadi rumah sakit rujukan bagi kita semua. Walaupun segala sesuatu semua tidak sempurna tetapi itu menjadi salah satu rumah sakit yang baik selain rumah sakit-rumah sakit yang lain yang ada di Bali ini pasti. Karena Bali adalah satu daerah destinasi wisata yang pasti banyak kita kunjungi,” tutupnya. ■sc

Wakil Ketua BURT DPR RI
Novita Wijayanti. Foto: Suci/mvi





Wakil Ketua BURT DPR RI A. Bakri bertukar cenderamata dengan Direktur RS Petrokimia Gresik. Foto: Nita/nvl

BURT DPR Berharap Layanan RS Petrokimia Gresik Ditingkatkan

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI A. Bakri berharap pelayanan Rumah Sakit Petrokimia Gresik dapat ditingkatkan. Bukan hanya untuk Anggota DPR RI yang merupakan peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), tetapi juga pelayanan terhadap masyarakat harus betul-betul ditingkatkan.

“Alhamdulillah pelayanannya cukup baik. Kami berharap mudah-mudahan pelayanan (RS Petrokimia Gresik) bisa dapat ditingkatkan dan yang terpenting lagi bukan hanya Anggota

DPR, tetapi masyarakat yang harus betul-betul ditingkatkan,” ungkap Bakri saat memimpin pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan Direktur RS Petrokimia Gresik serta manajemen Jasindo, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/6).

“Tadi berkembang juga (masukan) dari teman-teman mengenai pelayanan BPJS yang kita tahu di mana-mana menjadi keluhan, itu juga menjadi fokus utama kita supaya pelayanan BPJS bukan hanya anggota DPR, tetapi masyarakat mereka juga harus mendapatkan fasilitas yang baik dan sempurna,” ungkap politisi Partai

Amanat Nasional (PAN) itu.

Sementara, Anggota BURT DPR RI Sadarestuwati berharap di era digital maka rumah sakit harus menyediakan layanan secara digital atau *lost card*, sehingga pasien tidak lagi diharuskan menunjukkan kartu keanggotaan, namun hanya cukup melihat di *website*.

“Saya mendukung yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, bahwasanya cukup dengan data yang di *web* itulah yang dipakai acuan. Artinya di manapun kita tidak tergantung dengan fisik kartu yang harus kita bawa ke mana-mana gitu,” ujar Sadarestuwati.

“Ini terjadi pada fasilitas asuransi Jamkestama yang terbilang mahal, bagaimana dengan asuransi lainnya, belum lagi asuransi yang bermasalah dan nyatanya mereka juga mengalami cukup kesulitan,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Sebagaimana diketahui, bahwa kunjungan BURT DPR RI ke RS Petrokimia Gresik guna mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh RS *provider* Asuransi Jasindo dalam memberikan pelayanan kepada peserta Program Jamkestama. ■ nta/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani melakukan kunjungan dan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat di Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu (6/6). Foto: Gerald/nvl



Tim Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera meninjau berbagai inovasi yang dikembangkan di *Science Technology Industrial Park* (STIP) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (8/6). Foto: Sofyan/nvl



Kepala BK Setjen DPR RI (BKD) Inosentius Samsul disaksikan Anggota Komisi II DPR RI Rifqizami Karsayuda menandatangani Nota Kesepahaman antara BK DPR RI dengan Universitas Brawijaya (UB) di Malang, Jawa Timur, Jumat (4/6). Foto: Husen/nvl